

Judul : Kerjasama Parlemen Indonesia-Pasifik: Terobosan Penting Diplomasi Kawasan
Tanggal : Kamis, 02 Agustus 2018
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Kerjasama Parlemen Indonesia-Pasifik: Terobosan Penting Diplomasi Kawasan

Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), yang digelar di Jakarta, 23-24 Juli 2018, pantas dicatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Indonesia. Forum ini menandai babak baru dalam diplomasi Indonesia di tengah negara-negara tetangganya di Pasifik Selatan.

IPPP 2018, yang mengusung tema "Human Development and Maritime Sustainability", sukses dihadiri oleh 15 negara. Selain Indonesia, yang menjadi tuan rumah, forum ini dihadiri oleh Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Kepulauan Cook, Tonga, Samoa, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Palau, Tuvalu, Nauru, dan Kiribati, Polinesia dan Kaledonia Baru. Artinya, dari seluruh negara Pasifik Selatan yang diundang, hanya Vanuatu dan Niue yang tak bisa hadir.

"Meski secara geografis merupakan tetangga terdekat Indonesia di wilayah timur, peluang kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan selama ini belum terekplorasi secara optimal," jelas Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, yang juga merupakan Ketua Tim Diplomasi Parlemen Indonesia. "Selama ini kebijakan luar negeri Indonesia memang lebih banyak memandang ke Barat dan ASEAN, dan secara proporsional kurang memandang ke Timur. Belakangan, kita baru menyadari jika kebijakan tersebut perlu dikoreksi."

Menurut Fadli, IPPP 2018 merupakan inisiatif sekaligus terobosan penting dari diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan Indonesia di tengah-tengah negara tetangga di kawasan Pasifik Selatan. "Mengingat negara-negara Pasifik Selatan umumnya menganut sistem parlementer, tentu diplomasi parlemen perlu mengambil peranan penting di dalamnya. Itu juga yang melatarbelakangi kenapa DPR RI menginisiasi forum ini," jelasnya.

"Indonesia menganggap negara-negara Pasifik sebagai mitra penting, bukan hanya karena kedekatan geografis, tetapi juga dalam hal potensi yang dimiliki bersama untuk pembangunan berkelanjutan. Dari 14 negara yang hadir, semua negara sepakat jika lautan tak seharusnya dijadikan tembok pemisah, melainkan seharusnya dijadikan alat pemersatu. Indonesia, bersama dengan tetangga-tetangganya di Pasifik, merupakan satu benua biru, sebuah benua maritim. Itu sebabnya tema pembangunan manusia dan maritim dijadikan tema IPPP. Bagaimana pun, perekonomian Indonesia dan



FOTO DOKUMEN DPR RI

negara-negara Pasifik memang sangat terikat dan tergantung pada 'Blue Economy'."

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik memiliki potensi ekonomi dan sumber daya laut yang tak tertandingi. Namun, potensi tersebut juga datang dengan tantangan, seperti perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, meningkatnya limbah plastik, yang kesemuanya perlu diatasi. Persis di situ, semua negara berpandangan jika masalah-masalah tadi akan lebih mudah diatasi jika ada kemitraan di kawasan."

Hampir semua delegasi dari negara yang hadir menyampaikan jika forum ini sebenarnya "terlambat". Artinya, sebagai negara besar Indonesia seharusnya sudah sejak lama menjadi inisiator forum kerjasama seperti ini. Bahkan, saking hormatnya terhadap Indonesia, banyak delegasi negara Pasifik Selatan tak segan memanggil Indonesia dengan sebutan 'kakak'.

"Mewakili DPR, saya merasa senang sekali atas pujian tersebut. Apalagi, pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, juga sangat antusias dan berterima kasih atas inisiatif DPR ini," terang Fadli.

IPPP 2018 dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Senin, 23 Juli 2018. Sesudah pembukaan, seluruh delegasi bersidang hingga petang hari. Ada tiga sesi sidang yang menghadirkan sejumlah pembicara. Pada sesi pertama, yang sidangnya dipimpin oleh Dr. Fadli Zon dan Dr. Jiko Luveni (Ketua DPR Fiji), delegasi parlemen tiap negara diperilakan menyampaikan pidato sambutan terkait IPPP 2018.

Pada sesi kedua, yang dipimpin oleh Dr. Desra Percaya (Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri)

dan Fatafehi Fakafanua (Ketua DPR Kerajaan Tonga), dibahas topik ekonomi maritim dan pembangunan berkelanjutan, yang menghadirkan pembicara Luhut B. Pandjaitan (Menko Kemaritiman RI), Tebua Uaai (Ketua DPR Kiribati), Wesley W. Simina (Ketua DPR Mikronesia), Michael Manufandu (Dubes RI untuk Kolombia), dan Dr. Arif Satria (Rektor IPB).

Sedangkan, pada sesi ketiga, yang dipimpin oleh Dr. Nurhayati Ali Assegaf (Ketua BKSAP DPR RI) dan Ajilon Japsper Nasiru (Ketua DPR Kepulauan Solomon), topik yang dibahas adalah mengenai pembangunan manusia. Para narasumber pada sesi ini adalah Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro (Menteri PPN/Kepala Bappenas), Cyril Buraman (Ketua DPR Nauru), Kenneth A. Kedi (Ketua DPR Kepulauan Marshall), Anita Nirody (UNDP), dan David Thirlby (Westminster Foundation for Democracy).

Pada hari kedua, seluruh delegasi diundang ke gedung DPR RI untuk melakukan penanaman 17 jenis bibit pohon. Penanaman bibit pohon dilakukan oleh ketua delegasi masing-masing negara, dengan didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon dan Dr. Agus Hermanto, serta Ketua BKSAP Dr. Nurhayati Ali Assegaf.

Menurut Fadli, forum IPPP tidak boleh berhenti hanya di situ, di level strategis dan simbolik semata. "Forum ini harus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang dan ditindaklanjuti oleh berbagai kerjasama yang lebih teknis. Sekali lagi, ini adalah sumbangan diplomasi parlemen untuk mendukung kepentingan diplomasi Indonesia di tengah-tengah negara Pasifik yang bertetangga," pungkasnya. ●